

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018 DI KABUPATEN PINRANG**

DEWI SRI LESTARI

Nomor Stambuk : 105610539015



JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018 DI KABUPATEN PINRANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

DEWI SRI LESTARI

Nomor Stambuk : 105610539015

Kepada

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Dewi Sri Lestari

Nomor Stambuk : 105610539015

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Ruskin Azikin, MM



Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos M.Si

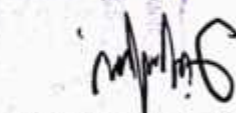
Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Nasrul Haq, S.Sos. M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0055/FSP/A.4-II/IX/41/2019, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jumat Tanggal 27 September 2019



1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (Ketua)
2. Drs. Ruskin Azikin, MM
3. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda yang di bawah ini :

Nama Mahasiswa : DEWI SRI LESTARI
Nomor Stambuk : 105610539015
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.



Makassar, 2019

Yang Menyatakan,

DEWI SRI LESTARI

ABSTRAK

DEWI SRI LESTARI (2019), Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang. (dibimbing oleh Ruskin Azkin dan Samsir Rahim)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang dan faktor determinan sehingga pemilih pemula tidak ikut dalam partisipasi politik. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari keterangan informan yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui dan bisa dipercaya dalam memberikan informasi yang akurat dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi langsung ke lokasi penelitian, wawancara secara mendalam dan dokumentasi di lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Pinrang KPU bekerja sama dengan relawan demokrasi dan beberapa organisasi masyarakat lainnya dalam melakukan sosialisasi, memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada setiap panitia yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kinerja meskipun tidak dilakukan secara rutin, sosialisasi kepada tiga segmen masyarakat diantaranya anak SMA, Mahasiswa dan Masyarakat umum sesuai dengan metode yang digunakan, serta memanfaatkan media elektronik dan media internet. Faktor penghambat sehingga pemilih pemula tidak ikut dalam memilih yaitu kesibukan sehari-hari, pengaruh dari lingkungan keluarga, dan perasaan tidak mampu.

Kata Kunci: Strategi, Partisipasi Politik, Pemilih Pemula

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “ strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang dapat terselesaikan, Semoga senantiasa mendapatkan ridho-Nya.Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang menjadi suri tauladan yang sempurna bagi seluruh umatnya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari Orang Tua Penulis, yang termulia dan tercinta Ayahanda Mustari dan Ibunda tercinta Jumria yang telah mendidik dan mendoakan anak-anaknya dengan kasih sayang serta kesabaran yang penuh keikhlasan sepanjang masa sehingga skripsi ini bisa dikerjakan dengan baik, penghargaan, simpuh dan sujud do'a semoga Allah SWT memberinya umur panjang, kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya.

Penulis menyadari juga bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Ruskin Azkin, M.M selaku pembimbing I dan Dr. H. Samsir Rahim,S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan

waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,MPA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar atas jasa dan jeri payahnya dalam menyiapkan sarana dan prasarana belajar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu membimbing dan mengarahkan saya untuk terus rajin belajar.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
7. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan baik.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh responden yang berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan masyarakat Kecamatan Duampanua

atas kesediannya untu membantu penulis dan bersedia untuk diwawancarai dalam rangka merampungkan penelitian.

9. Saudara-saudaraku tercinta Kakanda Masturi A.Md.Keb Ridwan S.Pi dan Anasruddin A.Md. Kep atas doa dan dukungannya selama ini.

10. Teristimewa para KUTBAL Indah, Putri, Ayu, Mila, Indri, Wara, Niar, Yustika, Risna, Fatma yang telah banyak membantu, mendukung, memotivasi penulis selama menyusun skripsi.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Penerimaan Tim	iv
Halaman Pernyataan Asli Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Konsep Teori.....	7
B. Kerangka Fikir	23
C. Fokus Penelitian.....	24
D. Deskripsi Fokus Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Informan Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Pengabsahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Objek Penelitian.....	34
B. Hasil Penelitian.....	47
C. Pembahasan	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Tabel Informan Penelitian.....	28
1.2 Nama-Nama Kecamatan Dan Jumlah Kelurahan Di Kabupaten Pinrang	34
1.3 Gambar Peta Kabupaten Pinrang	37
1.4 Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabuupaten Pinrang 2018 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur	39
1.5 Struktur Organisasi Kantor KPU Kabupaten Pinrang.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia, maka pasti akan berkaitan dengan pemilihan umum. Salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam hak pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum tersebut. Indonesia merupakan Negara yang menggunkan sistem demokrasi, yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat.

Berdasarkan tugas KPU dalam Undang- undang Nomor 22 tahun 2007 pasal 8 (1) mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban komisi pemilihan umum bahwa KPU mempunyai tugas menyelenggarakan sosialisasi, penyelenggaraan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat, oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu maka KPU Pinrang sebagai penyelenggara mempunyai tanggung jawab besar untuk mengsucceskan pemilu tersebut demi terlaksananya pemilu yang optimal, jujur dan adil. Sehingga KPU Pinrang harus memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama dikalangan pemilih pemula strategi tersebut biasa berupa sosialisasi atau pendidikan politik . strategi ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh KPU agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu, selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat juga perlu diberikan

pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipengaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri.

Sosialisasi pemilu dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan nalar serta hati nuraninya tanpa mendapat intervensi dari pihak manapun.

Untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU dan KPU kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang diantaranya: a) Merencanakan, memimpin dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan pemilihan umum, sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku b) Membentuk, memberi arahan dan mengkoordinasikan organisasi pelaksanaan pemilihan umum ditingkat provinsi, dan kabupaten/kota, serta panitia pemilihan luar negeri (PPLN) c) Menyusun dan menetapkan tata cara serta tata laksana pemilihan umum sebagai penjabaran teknis peraturan perundang-undangan d) Merencanakan, memimpin, dan menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian logistic pelaksanaan pemilihan umum e) Mengumpulkan, mensistematisasi, mengelolah dan mengpublikasikan bahan serta data hasil pemilihan umum.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok, dimana orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, misalnya ikut pemilu, mempengaruhi pengambilan keputusan, dan ikut partai politik (Kaelola, 2009).

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Negara, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan, warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. kegiatan warga Negara bisa dibagi dua memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.

Menurut undang-undang No.10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/perna kawin yang mempunyai hak pilih dan sebelumnya belum di dalam kegiatan pemilihan umum (pemilu) mereka biasa berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah. (Hasibuan,2009).

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga Negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka tidak memiliki pengalaman

voting pada pemilu sebelumnya, namun ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik.

Melihat dari penelitian yang sebelumnya dilakukan Indar Melani (2013) menunjukkan bahwa jumlah pemilih tahun 2013 yang memiliki hak pilih sebanyak 244.280 orang yang tersebar diseluruh TPS. Dari jumlah tersebut pemilih pemula yang memiliki hak pilih lebih kurang 6.515 dari jumlah pemilih yang tersebar di 682 TPS yang ada dikabupaten Pinrang. Jumlah pemilih pemula tersebut tentunya membawa dampak yang berpengaruh pada kemenangan seseorang konstantan atau calon.

Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi politik Kabupaten Pinrang dalam pemilu masih sangat minim terutama dikalangan pemilih pemula dan dibutuhkan kerja keras berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, karena dimasa perkembangan dari pemilih pemula kepercayaan-kepercayaan politiknya sangat dipengaruhi oleh teman-teman, keluarga dan lingkungan. Maka dari itu komisi pemilihan umum ataupun partai politik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat agar menjadi salah satu factor penentu tinggi rendahnya partisipasi politik dalam kelompok masyarakat. Komisi pemilihan umum merupakan lembaga yang independen yang diberi wewenang dari lembaga ini. Dalam hal ini sukses atau tidaknya pemilihan umum di Indonesia turut pula dipengaruhi oleh kinerja dari komisi pemilihan umum sendiri. Maka dari itu komisi pemilihan umum juga berkewajiban untuk melakukan sosialisasi pemilihan umum pada masyarakat.

Namun faktanya pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 Kabupaten Pinrang. Menurut Andi Bakhtiar Tombong selaku anggota komisi pemilihan umum Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa jumlah pemilih tahun 2018 yang menggunakan hak pilih sebanyak 257.415 orang yang tersebar diseluruh TPS. Dari jumlah tersebut pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya 38.832 orang laki-laki 20.008 sedangkan perempuan 18.842 pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di kabupaten Pinrang dan sebanyak 723 TPS. Meskipun sudah terbilang cukup tinggi namun tetap saja tidak memenuhi target seperti yang ditetapkan oleh KPU pusat. (www.SahabatNews.Net).

Tidak ada salahnya jika hal tersebut menjadi salah satu perhatian utama, karena pemilih pemula juga berhak menentukan siapa yang pantas memimpin Kabupaten Pinrang kedepan, dengan begitu mereka memposisikan dirinya sebagai warga Negara yang memiliki kewajiban untuk menggunakan hak sebagai warga Negara.

Berdasarkan apa yang telah diutarakan diatas maka penulis tertarik mengangkat judul tentang **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula tahun 2018 di Kabupaten Pinrang?
2. faktor penghambat sehingga pemilih pemula tidak ikut dalam partisipasi politik?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula tahun 2018 di kabupaten pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat sehingga pemilih pemula tidak ikut dalam partisipasi politik.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan agar dari penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Dalam penyelenggaraan pemilu partisipasi masyarakat merupakan aspek yang sangat penting sehingga KPU perlu menggunakan strategi terkhusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan (Gleko, dkk, 2017). Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti mentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengelolaan sumber daya untuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (salusu 2015:64).

Pendapat lain dikemukakan oleh Arifin (2004) startegi merupakan pondasi tujuan organisasi dan pola gerak serta pendekatan manajemen pencapaian tujuan. Strategi juga merupakan rencana menyatu komprehensif dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan strategi dengan kesempatan dan ancaman yang yang datang dari luar.

Berbeda dengan Effendi (2016: 32) strategi merupakan perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang hanya dapat dicapai menggunakan taktik operasional. Sebuah strategi komunikasi hendaknya mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan untuk

mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan khalayak sasaran akan memperoleh manfaat berdasarkan sudut pandangnya, dan bagaimana khalayak sasaran yang lebih besar dapat dijangkau secara efektif.

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan strategi merupakan suatu kerangka perencanaan dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam waktu yang telah ditentukan. (Angung Nugroho 2018).

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategi yang artinya seni atau ilmu untuk menjadai seseorang jenderal. Strategi ini juga dapat diartikan sebagai suatu rencana untuk pengembangan dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan (Triciptono,2006:3).

Dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi maka suatu organisasi menggunakan bentuk atau tipe strategi tertentu. Menurut konten dalam Salusu (2008:104) tipe-tipe strategi terdiri dari beberapa tipe:

- a. Strategi organisasi (*strategy corporate*). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru.

- b. Strategi program (*program strategy*) strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategik dari suatu program tertentu.
- c. Strategi pendukung sumber daya (*resources support strategy*). Strategi sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
- d. Strategi kelembagaan (*institutional strategy*). Focus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisais untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik.

Pengetian strategi mencerminkan bahwa strategi tidak hanya berkaitan dengan perencanaan dan gerakan, tetapi juga posisi yang dituju, tindakan dan kebijakan yang diperlukan.

2. Tujuan strategi

Menurut Bambang Hariadi tahun 2005, perumusan strategi adalah proses-proses penyusunan langkah demi langkah yang bertujuan untuk visi dan misi organisasi yaitu:

- a. Mengidentifikasi atau memahami lingkungan sekitar perusahaan di masa depan dan menentukan visi misi perusahaan guna tercapainya tujuan bersama.
- b. Melakukan analisis internal dan eksternal perusahaan untuk mengukur kelebihan dan kekurangan serta peluang dan ancaman di masa yang akan datang yang menghambat tercapainya misi.

- c. Merumuskan dan merencanakan faktor-faktor ukuran keberhasilan *key success factors* dari strategi yang sudah di buat pada tahap analisis.
- d. Menentukan ukuran tujuan target, mengevaluasi dan memeriksa strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
- e. Memilih strategi yang sesuai untuk mencapainya tujuan jangka pendek dan panjang.

3. Tingkatan strategi

Wheelen dan Hunger (1990) mengenal tiga tingkat strategi yaitu :

a. Strategi perusahaan

Enterprise strategi yang berhubungan dengan masyarakat, tentunya setiap organisasi berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol.

b. Strategi perusahaan

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, jadi sering disebut Grand Strategy meliputi bidang yang berkaitan suatu organisasi.

c. Strategi bisnis

Menjelaskan bagaimana merebut pasaran/harga pasar di tengah masyarakat public.

4. Perencanaan strategi

Chandler (dalam Salusu 2015 : 64) untuk mencapai suatu proses pencapaian tujuan dengan baik maka berikut beberapa perencanaan strategi yang perlu diperhatikan:

a. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Tahap formulasi ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan dalam perencanaan, hal ini dapat dilihat dari penentuan tujuan pelaksanaan sosialisasi, sasaran pelaksanaan sosialisasi serta mengenai identifikasi ancaman dan peluang, kekuatan dan kelemahan organisasi.

b. Pemilihan tindakan

Pada pemilihan tindakan ini dapat dikatakan juga sebagai penentuan tindakan sosialisasi dengan menggunakan berbagai metode diantaranya:

1. Sosialisasi komisi Pemilihan Umum kepada segmen pemilih pemula, kesadaran kepada pemilih pemula tentang pentingnya peran pemuda dalam kegiatan demokrasi, serta pemuda merupakan pilar penting kesuksesan suatu wilayah sehingga partisipasi mereka sangat penting untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan bangsa. Sosialisasi ini dengan sasaran yaitu meliputi remaja SMA/SMK dan masyarakat umum yang baru memasuki usia 17 tahun secara pengalaman dan pemahaman masih sangat minim karena mereka belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya sehingga segmen ini sangat penting untuk dilakukan sosialisasi karena secara kuantitas jumlah pemilih pemula terbilang cukup banyak.

2. Sosialisasi komisi pemilihan umum pada segmen Mahasiswa, komisi pemilihan umum memang sudah menjadi agenda pihaknya untuk memberikan edukasi kepada calon pemilih di kalangan Mahasiswa mereka dianggap sebagai agen perubahan yang nantinya bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihan mereka dengan bijak, melalui dengan adanya sosialisasi ini diharapkan mahasiswa dapat menyampaikan kepada masyarakat agar mereka terdidik tersadar secara sukarela dalam memilih dan tentunya mengetahui apa itu pemilih yang cerdas.

c. Alokasi sumber daya

Dalam alokasi sumber daya ini lebih mengarah pada bimbingan teknis para petugas pemilukada dan panitia *ad hoc* yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dalam pengetahuan dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggara pemilukada untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan kegiatan dan tahapan yang telah dan yang akan dikerjakan.

5. Teori partisipasi politik

Komisi pemilihan umum sebagai lembaga Negara yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan pemilu terus berupaya agar pemilu dapat berjalan dengan baik dan benar. Ukuran keberhasilan pemilu di Indonesia sebetulnya sangat sederhana kegiatan ini dapat dianggap sukses besar jika

pelaksanaannya berjalan *luber* (langsung, umum, bebas, rahasia) serta *jurdil* (jujur dan adil) dan tingkat partisipasi tinggi. Hal yang tidak sederhana adalah mengamankan agar asas pemilu tersebut bisa terpenuhi. Bila asas *luber* dan *jurdil* ini bisa berjalan dengan baik, maka ukuran berikutnya adalah pencapaian tingkat partisipasi warga (Supriyono, 2014:47).

Merujuk pendapat Supriyono, (2014:39) keikutsertaan masyarakat (partisipasi) dalam pemilu merupakan salah satu bentuk untuk mempengaruhi keputusan proses politik berupa pemilihan calon pemimpin. Proses ini merupakan salah satu tahap penting karena akan sangat berpengaruh terhadap model dan kebijakan apa yang akan diambil dan dijalankan oleh pemerintah mendatang. Rakyat sangat berkepentingan untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemimpin yang akan membawa Negara kearah yang lebih baik.

Pendapat lain dikemukakan oleh Kumoroto dalam Erfiza (2012:151) Mengatakan bahwa partisipasi merupakan berbagai corak tindakan massa maupaun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di Negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga Negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan

pemerintah partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari beberapa pengertian mengenai partisipasi politik di atas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga Negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga berupa kegiatan yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990). Membatasi pengertian partisipasi mereka tentang partisipasi politik pada beberapa hal:

Pertama mencakup berbagai kegiatan-kegiatan politik dan bukan sikap-sikap. dalam pengertiannya tidak memasukkan komponen-komponen subjektif seperti pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik dan keefektifan politik tetapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana berbagai sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan berbentuk tindakan politik.

Kedua, yang dimaksud dalam partisipasi politik itu adalah warga Negara preman (biasa), bukan pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai pekerjaan yang profesional di bidang itu, padahal justru kajian ini pada warga Negara biasa.

Ketiga kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah kegiatan yang dimaksud

misalnya membujuk atau menekan pejabat pemerintah untuk bertindak dengan cara-cara tertentu untuk mengagalkan keputusan, bahkan dengan cara berusah mengubah aspek-aspek system politik atau mengubah secara mendasar struktur politik system secara keseluruhan agar pemerintah lebih tanggap terhadap keinginan-keinginan mereka.

Keempat, mencakup seluruh aktivitas yang ditujukan agar pemerintah terpengaruh, tanpa mempedulikan hasil kedepannya atau ada tidaknya efek yang dihasilkan.

Kelima, partisipasi politik berupa kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak langsung, artinya langsung oleh pelakunya itu sendiri tanpa menggunakan perantara tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan pemerintah.

6. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Rahman Surbakti (2007 :144) membedakan tipe partisipasi masyarakat kedalam empat macam yaitu:

- a. Partisipasi aktif kegiatan warga Negara yang senantiasa memperlihatkan perilaku tanggap (responsive) terhadap berbagai tahap kebijakan pemerintah atau dengan kata lain ketika seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang cukup tinggi maka partisipasi politik dapat dikatakan cenderung aktif.
- b. Partisipasi Militan-Radikal, warga Negara yang senatiasa menampilkan perilaku tanggap (responsife) terhadap berbagai

kebijakan pemerintah. Partisipasi militant-radikal ini berbeda dengan partisipasi aktif, yang cenderung mengutamakan cara-cara konvensional, dalam partisipasi ini cenderung menggunakan cara-cara non konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dapat dikatakan kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah maka akan melahirkan militan radikal.

- c. Partisipasi Pasif, kegiatan warga Negara yang menerima/menaati segala kebijakan pemerintah yang dibuat, jadi partisipasi pasif ini cenderung tidak mempersolakan apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau dapat dikatakan kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaannya terhadap pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (pasif).
- d. Partisipasi Apatis, seseorang yang tidak ingin tau dengan segala kebijakan public yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, orang yang seperti ini bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan system politik yang yang di keluarkan atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka dapat dikatakan partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatitis).

7. Fungsi Partisipasi Politik

Menurut Lane dalam studynya mengenai keterlibatan politik menyebutkan bahwa partisipasi politik memiliki empat fungsi:

- a. Fungsi *pertama* sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.
- b. Fungsi *kedua* sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas dan bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik. Orang-orang yang demikian itu merasa puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.
- c. Fungsi *ketiga* sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, orang berpartisipasi dalam politik karena politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek, tender-tender, dan melicinkan karier bagi pejabatnya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai, akan makin mendorong partisipasinya dalam politik. Terlebih lagi bagi seseorang yang terjun dalam bidang politik, seringkali politik dijadikan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya.
- d. Fungsi *keempat* sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, yakni bahwa

keterlibatannya dalam bidang politik untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

8. Factor-Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi politik

Adapun menurut Milbrath dalam Maran Rafael (2007) menyebutkan dua factor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, yaitu factor pendukung dan penghambat. Lima factor utama yang mendukung berpartisipasi politik, antara lain;

a. Sejauh mana orang menerima prasangka politik.

Karena adanya prasangka, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat berpartisipasi dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau diskusi formal maupun informal.

b. Faktor karakteristik pribadi seseorang

Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, biasanya mau terlihat dalam aktifitas politik.

c. Karakteristik sosial

Menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang bagaimanapun juga lingkungan sosial itu mempengaruhi

persepsi, sikap perilaku seseorang dalam bidang politik . oleh sebab itu mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik,

d. Situasi atau lingkungan politik itu sendiri.

Lingkungan politik kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang yang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

e. Pendidikan politik.

Ada pula yang menambahkan sebagai pendidikan politik sebagai warga Negara merupakan factor pendukung lainnya yang sifatnya internal bagi suatu kelompok yang melaksanakan partisipasi politiknya.

Selain factor pendukung Milbrath juga menyebutkan 3 faktor yang dapat menjadi penghambat suatu partisipasi politik. Adapun factor penghambat dari partisipasi politik itu antara lain:

a. Kebijakan induk organisasi selalu berubah

Maksud dari kebijakan induk yang selalu berubah ini, organisasi atau badan yang dipandang elit politik dalam tubuh suatu organisasi masyarakat atau seseorang pemilih selalu merubah kebijakan terhadap partisipasi yang ada dengan denagn yang baru sesuai situasi dan kondisi.

b. Pemilih pemula yang otonom.

Pemilih pemula yang otonom akan membuat gerakan politisnya tidak independen, pemilih pemula tersebut berada dalam hubungan suatu organisasi induknya, baik sifatnya konsultasi atau koordinasi.

c. Dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk mengsucceskan.

Dukungan yang kurang selama proses partisipasi politik akan menghambat aktivitas politik pemilih pemula komunikasi dengan induk organisasi harus berdasakan pendapat diatas dalam partsipasi politik terhadap juga factor penghambat yang dapat mebuat seseorang untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik, yaitu kebijakan induk organisasi yang selalu berubah, pemilih pemula yang otonom, dan dukunga kurang dari induk organisasi untuk mengsucceskan kegiatan politik. Dengan tiga factor itu seseorang bias menjadi tidak berpartisipasi politik dalam kegiatan politik seperti pemilu.

Menurut Subakti (2012) beberapa factor yang menyebabkan orang mau ikut atau tidak mau ikut dalam berpartisipasi politik antara lain :

a. Situasi social dan ekonomi

Situasi social adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sednagkan situasi ekonomi kedudukam seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan kekayaan.

b. Situasi

Menurut surbaki, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi actor secara langsung seperti cucaca, keluarga,

kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

c. Kesadaran politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

d. Kepercayaan terhadap pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah dia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintah.

e. Perasng partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi formal.

Berdasarkan pengertaaian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih merupakan bagian dari partisipasi politik, yaitu dalam bentuk pemebrrian suara dalam pemilihan umum. Partisipasi pemilih hanya bagian konvensional dari partisipasi politik.

9. Pemilih Pemula

UU No. 10 tahun 2008 dalam BAB IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan

atau lebih sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu.

Kelompok pemilih pemula ini juga biasanya berstatus pelajar, Mahasiswa, serta pekerja muda yaitu mereka masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ketingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik.

10. Karakteristik Pemilih Pemula

Karakteristik pemilih pemula dalam (Firman 2014) mengemukakan bahwa:

- a. Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS
- Belum memiliki pengalaman memilih
- b. Memiliki antusiasme yang tinggi
- c. Kurang rasional
- d. Pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat yang apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik social didalam pemilu
- e. Memiliki rasa ingin tahu, mencoba dan berpartisipasi dalam pemilu meskipun kadang dengan berbagai latar belkang yang berbeda.

Hak memberikan suara atau memilih merupakan hak dasar setiap individu/atau warga yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara jaminan terhadap hak telah dituangkan baik dalam konstitusi maupun

dalam UU yakni UU No. 39/1999 tentang hak asasi manusia dan UU No. 12/2005 tentang ratifikasi hak sipil dan politik.

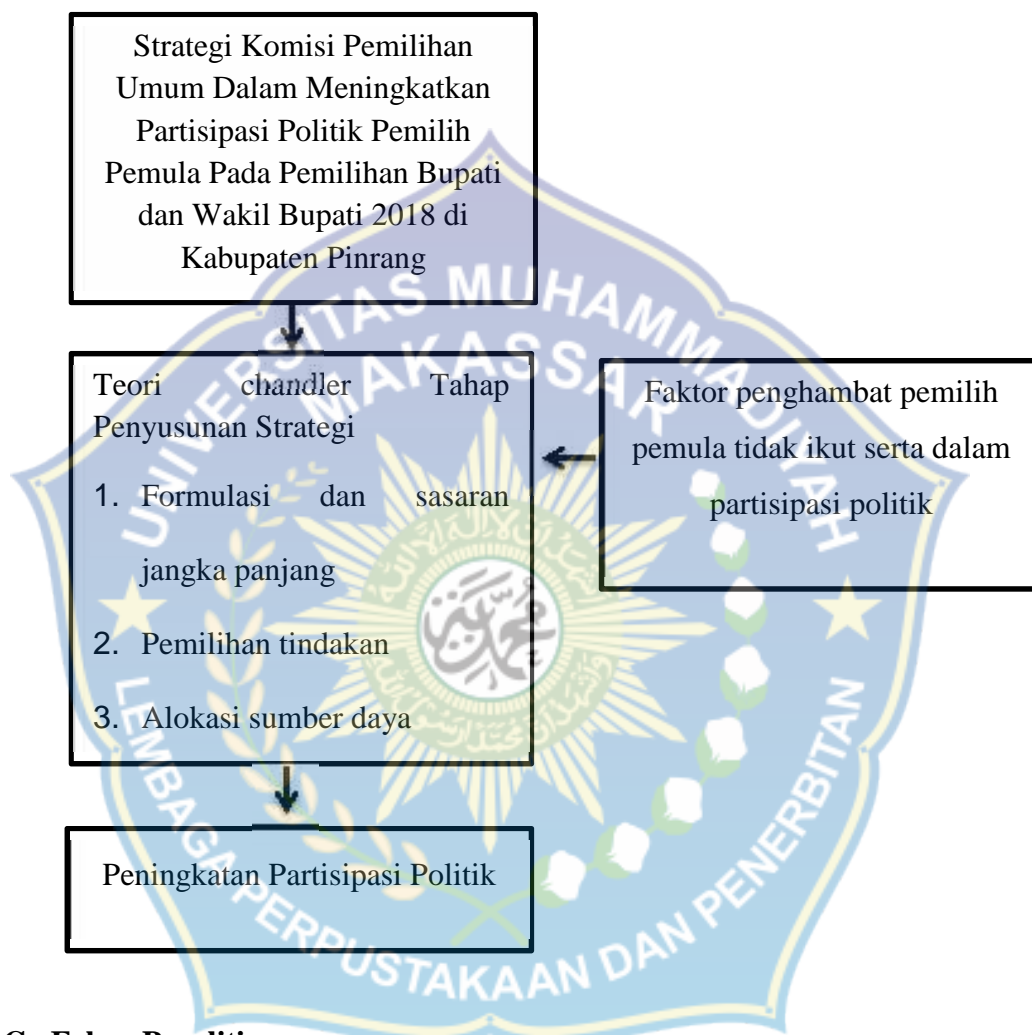
Di Indonesia Negara-negara maju dalam usia pemilih pemula disebut sebagai masyarakat yang sudah matang secara psikologis dan pada kenyataan di Negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) masih sangat banyak remaja (bahkan orang dewasa) yang belum mampu sepenuhnya mencapai kematangan secara psikologis . sehingga emosinya masih kurang stabil dan masih mudah terpengaruh dan goyah pendiriannya. Karena bagi partai politik tentu harus memberikan peranan penyadaran terhadap para pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu . alasan dibalik niat mencoblos para pemilih pemula adalah pemikiran bahwa apapun hasil pemilu akan berdampak juga bagi kehidupan mereka, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih baik ikut memberikan suara.

B. Kerangka Fikir

Pada kerangka fikir ini juga akan dijelaskan bahwa penelitian ini akan menganalisa bentuk strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilih pemula pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dan factor apa saja yang berpengaruh terhadap pemilih pemula.

Adapun teori yang digunakan pada penelitian menggunakan teori tahapan penyusunan strategi menurut Chandler dalam salusu ada tiga indikator diantaranya (1) formulasi dan sasaran jangka panjang pada tahap ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan dalam perencanaan serta tujuan yang

akan dicapai (2) Pemilihan tindakan yaitu penentuan tindakan sosialisasi dengan berbagai metode yang digunakan (3) alokasi sumber daya juga mengarah pada bimbingan teknis para petugas pemilukada.



C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilih pemula dan faktor penghambat sehingga pemilih pemula tidak ikut dalam partisipasi politik.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Tahap penyusunan strategi

a. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Tahap formulasi ini menunjukkan bahwa di mana KPU Kabupaten Pinrang menetapkan tujuan strategi serta merancang sebuah strategi agar tingkat partisipasi pemilih meningkat terutama di kalangan pemilih pemula.

b. Pemilihan tindakan

Pada pemilihan tindakan ini Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi kepada beberapa segmen pemilih dan bekerja sama dengan beberapa organisasi lainnya serta berbagai metode yang digunakan.

c. Alokasi sumber daya

Dalam alokasi sumber daya ini lebih mengarah pada bimbingan teknis dalam tahap ini KPU melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dalam pengetahuan dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggara pemilu.

BAB III

TINJAUN PUSTAKA

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dalam penelitian ini direncanakan selama 2 bulan pada tanggal 15 Juni 2019 – 15 Agustus 2019. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Jl. Bintang, Maccorawalie, Watang Sawitto Pinrang Sulawesi Selatan. Adapun alasan memilih objek tersebut karena Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum, dan berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilih pemula kabupaten pinrang, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu objek fenomena atau setting social dalam suatu tulisan yang bersifat narasi. Aratinya data, fakta, yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka mendeskripsikan suatu kejadian yang terjadi.
2. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, mengenai bagaimana strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten

Pinrang. Maksud penelitian ini adalah dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi dalam sertiap pelaksanaan pilkada khususnya mengenai partisipasi pemilih pemula.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang didapat dengan melakukan hasil penelitian secara langsung kepada objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer ini didapatkan dengan hasil wawancara langsung terhadap responden atau pihak-pihak yang terlibat atau melalui kuisioner yang diberikan yaitu berupa daftar pertanyaan yang berkaitan dengan strategi Komisi Pemiihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sebuah pihak kedua, ketiga dan seterusnya, misalnya dari sebuah instansi ataupun organisasi yang bersangkutan, atau perorangan dari pihak yang telah mengumpulkan dan mengalihnya, seperti data dokumentasi, data wawancara dengan masyarakat, foto-foto, buku-buku dan lain-lain yang relevan dengan penelitian. Hal ini diperoleh dengan mencari dan mengumpulkna data dari informan baik itu secra tertulis ataupun gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian. Untuk penelitian ini data diperoleh dari kantor komisi pemilihan umum serta sumber tertulis, yaitu

bersumber dari buku-buku atau literature yang berkaitan dengan judul dan tema dari penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang biasa memberikan informasi situasi dan keadaan latar penelitian. Untuk mendapatkan data secara represensif, maka diperlukan informasi kunci yang mengetahui dan memiliki kaitan dengan persoalan yang sedang dikaji. Informan dalam penelitian ini.

Table Informan Penelitian 1.1

No.	NAMA	INISIAL	JABATAN	JUMLAH
1.	Alamsyah	AS	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	1
2.	Muh. Ali Joddin	MA	Komisioner Devisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM	1
3.	Joni Bakri	JB	Anggota Teknis dan Hubungan Masyarakat	1
4.	Haryati Yusuf	HY	SMA Negeri 2 Duampanua	1
5.	Ananda Ramadhani	AR	Mahasiswa	1
6.	Hasnidar	HS	Tamatan SMA	1
7.	Ramlah	RL	Ibu Rumah Tangga	1
8.	Rahman	RM	Anggota PP-KPMP (Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang)	1

E. Teknis Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan salah satu langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat harus melalui tiga teknik tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2016:137).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

1. Teknik observasi

Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti guna menghasilkan keterangan yang berupa informasi, data serta fakta akurat yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk penelitian ini peneliti mengadakan observasi kepada pemilih pemula di kecamatan duampanua serta mendatangi kantor komisi pemilihan umum Kabupaten Pinrang. Pada teknik ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara keterangan informan atau responden dan data pada kenyataan yang ada dengan melakukan pengamatan langsung kepada objek penelitian.

2. Teknik wawancara

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran-gambaran tentang objek yang akan menjadi bahan penelitian dengan cara Tanya jawab secara lebih rinci dan terbuka dengan secara langsung kepada informan/responden. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan dan yang akan diwawancarai kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan yang

ditanyakan. Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan teknik komunikasi langsung dan yang menjadi focus wawancaranya adalah ketua kpu Kabupaten pinrang dan komisioner partisipasi politik serta pemilih pemula kabupaten pinrang.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data pendukung (data sekunder) dari berbagai literatur baik berupa buku-buku, majalah makalah, hasil penelitian yang relevan, Koran dan dokumen-dokumen yang tertulis sebagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian

F. Teknik Analisis Data.

Menurut Males dan Hubrmen (Sugiono,2016 : 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, aktivitas dalam analisis data, yaitu : data reduksi, data display dan conclusion drawing atau verification.

1. Reduksi data (Data reduction)

reduksi data secara mandiri untuk mendapatkan data yang mampu menjawab pernyataan penelitian, bagi peneliti pemula proses reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan peneliti akan berkembang, data hasil reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.

2. Penyajian data (data display)

Penyajian atau penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingatkan bahwa penelitian kualitatif banyak menyusun teks naratif, display adalah format yang menyajiakan informasi secara tematik kepada pembaca. Miles dan Huberman (Sugiono, 2016) memperkenalkan dua macam format, yaitu: diagram konteks (context chard) dan matriks

3. Penarikan kesimpulan (conclusion Drawing and verification)

Langka ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Pengabsahan Data

Moleong, Lexi (2014) mengemukakan bahwa pengabsahan data merupakan bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang diukur benar-benar variable yang akan diukur salah satu caranya dengan proses trigulasi, trigulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan antara sumber, teori, dan metode/teknik penelitian

1. trigulasi sumber

membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dengan apa yang dikatakan umum

dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada lebih lanjut. dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Pinrang. Peneliti membandingkan hasil wawancara maupun pengamatan langsung dilapangan baik itu dari perspektif internal maupun eksternal.

2. Triangulasi teknik

Untuk memperoleh data yang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk memperoleh data yang lebih akurat melalui observasi penelitian perlu adanya pengamatan beberapa kali tidak hanya dengan satu kali saja. Peneliti menggali informasi yang dibutuhkan terkait strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang Merupakan salah satu Daerah Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 km dari Makassar arah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Polowali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pinrang memiliki luas wilayah 1.961,77 km² dan Penduduk yang terbagi ke dalam 12 Kecamatan, meliputi 68 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak ±258.822.

Asal muasal pemberian nama Pinrang ada dua versi cerita yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. Versi pertama mengatakan Pinrang berasal dari bahasa bugis yaitu kata “benrang” yang artinya “air genangan” bisa juga berate “rawa-rawa”. Hal ini terjadi ketika awal dibukanya daerah Pinrang yang tepatnya saat ini di pusat kota Kabupaten Pinrang. Masih berupa daerah yang rendah sering tergenang dan berawa.

Versi kedua mengatakan bahwa hal ini terjadi karena suatu ketika Raja Sawitto yang bernama La Paleteang, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa berkat bantuan To barani pole' Kassadisambut gembira oleh warganya, namun mereka terkejut karena wajah sang raja berubah dan mereka berkata “pinra bawanni tappana puatta pole Gowa” yang artinya berubah saja wajah tuan kita dari Gowa, maka setelah itu warganya

mulai menyebut daerah tersebut sebagai Pinrayang artinya berubah kemudian berubah penyebutan menjadi Pinrang.

Kabupaten Pinrang, cikal bakalnya berasal dari Onder Ofdeling Pinrang yang berada di bawah afdeling Pare-Pare, yang merupakan gabungan dari empat kerajaan yang selanjutnya menjadi self bestuur atau swapraja yaitu KASSA, BATULAPPA, SAWITTO, dan SUPPA yang sebelumnya merupakan anggota konfederasi kerajaan Massenrengpulu (Kassa dan Batulappa) dan Ajatappareng (Suppa dan Sawitto), ini merupakan bagian dari adu domba Kolonial untuk memecah persatuan di Sulawesi Selatan.

Pemilihan nama Pinrang sebagai nama wilayah dikarenakan daerah Pinrang merupakan tempat perkumpulan ke empat raja tadi dan sekaligus tempat berdirinya kantor onder afdelingeen (kantor residen). Kemudian Onder afdeling Pinrang ini, pada Zaman pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrika Pinrang, kemudian pada zaman kemerdekaan pada akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang.

Table 1.2 Nama-Nama Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kabupaten Pinrang.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1.	Batu Lappa (Batulappa)	5
2.	Tiroang	5
3.	Paleteang	6
4.	Cempa	7
5.	Lasinrang (Lanrisang)	7

6.	Watang Sawito (watang Sawitto)	8
7.	Matiro Sompe	9
8.	Mattiro Bulu	9
9.	Suppa	10
10.	Patampanua	11
11.	Duampanua	15
12.	Lembang	16
	Jumlah	108

2. Visi dan Misi

Berbagai isu Nasional dan Daerah, yang berimplikasi pada isu daerah Kabupaten Pinrang, seperti kesejahteraan masyarakat, pemerataan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan, peluang kerja, perkembangan kawasan cepat tumbuh, pengembang kawasan pantai, lingkungan hidup, perbaikan pendidikan, kualitas kesehatan, perbaikan gizi, kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia, dll, perlu mendapat perhatian serta antisipasi bersama, yang kesemuanya perlu didukung oleh para pelaku pembangunan di kabupaten Pinrang.

Sebagaimana diketahui bahwa pernyataan rencana pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pinrang adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Pinrang Yang Maju, Dinamis, Dan Mandiri Dengan Pengembangan Agribisnis Dan Agroindustri Yang Berwawasan Lingkungan”

Terkaita dengan rencana pembangunan serta dengan mempertimbangkan potensi kondisi, aspirasi dan cita-cita masyarakat, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Pinrang, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang berkembang dikalangan masyarakat maka visi yang hendak terwujud melalui perencanaan target strategi dalam 5 (lima) tahun mendatang dirumuskan delama visi:

"Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Penataan Program Pembangunan Pro Rakyat menuju Terciptanya Kawasan Agropolitan Yang Didukung OIeh Penerapan Prinsip Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Visi tersebut, terintegrasi dengan Visi pembangunan Nasional dan bagian integral dari Visi pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan, didasarkan pada perubahan paradigam serta kondisi yang ada, memerlukan keterukuran dan komitmen berketanjutan. Harapan tersebut, menuntut adanya Akselerasi pencapaian Visi kedepan, yang diharapkan dapat lebih berperan dalam percepatan perkembangan internal wilayah. Berkaitan dengan permasalahan, peluang dan kondisi obyektif perkembangan daerah kedepan, maka untuk mewujudkan visi pembangunan kabupaten pinrang secara garis besar diformulasikan kedalam 7 (tujuh) rumusan misi diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah yang profesional
2. Mengoptimalkan pemanfaatan dana pelestarian SDA yang berwawasan lingkungan dan memperkuat angrebisnis dan angroindustri

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kemandirian lokal
 4. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
 5. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta infrastruktur terutama pada sektor pertanian.
 6. Meningkatkan pengalaman dan nilai-nilai keagamaan, pancasila dan budaya lokal,
 7. Meningkatkan keamanan dan keterlibatan umum.
3. Peta wilayah Kabupaten Pinrang

1.3 Gambar Peta Kabupaten Pinrang



4. Deskriptif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018

Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis sekaligus membentuk pengetahuan masyarakat tentang politik terutama bagi pemilih pemula maka Kabupaten Pinrang melaksanakan pemilihan umum pada tanggal 27 juni 2018 dan telah melaksanakan pemilihan Kepala daerah secara langsung berdasarkan amanat Undang-Undang yang berlaku.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Sulawesi selatan dilaksanakan secara serentak pada 27 juni 2018 mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 13:00 WITA bersamaan dengan pemilihan pilkada di beberapa Kabupaten/Kota lainnya. pasangan calon yang diusung partai politik terdiri dari 4 (empat) pasangan.

Pasangan suara yang memperoleh suara terbanyak dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 Andi Irwan Hamid dan Alimin atau disingkat dengan Bersama. Bersama memiliki jumlah suara terbesar sebanyak 86.256 atau 44,60 persen dari total pemilih. Kemudian di susul oleh paslon nomor urut 1 Abdul Latif dan Usman Marham dengan raihan suara sebanyak 81.087 atau 39,43 persen dari total pemilih. Pasangan nomor urut 3 Jamaluddin dan Andi Sofyan meraih 37.454 atau 20,21 persen dan yang terakhir disusul oleh paslon nomor urut 4 Hamka Mahmud dan Ahsan Wahid sebesar 8.277 atau 295 persen.

Dari pembahasan di atas bahwa basis suara atau prolehan suara tertinggi dimenangkan oleh pasangan paslon nomor urut 2 sebanyak 86.256 perolehan suara dari 12 kecamatan, adapapun jumlah pemilih

pemula yang terdaftar dalam pemilihan umum dari 12 kecamatan sebanyak 38.832 orang dan masing-masing diambil dari umur 17 tahun sampai dengan umur 21 tahun.

5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Oleh Kpu Kabupaten Pinrang

Kabupaten :Pinrang
Provinsi :Sulawesi selatan

Tabel 1.4 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pinrang 2018 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS		
			P	L	P+L
1.	Mattiro Sompe	9	10,245	9.168	19.413
2.	Suppa	10	11.371	10.684	22.055
3.	Mattiro Bulu	9	10.701	9.984	20.685
4.	Watang Sawitto	8	18.217	16.386	34.603
5.	Patampanua	11	12.019	10.896	22.915
6.	Duampanua	15	16.684	15.536	32.220
7.	Lembang	16	16.303	16.134	32.437
8.	Cempa	7	6.419	5.859	12.278
9.	Tiroang	5	7.731	7.408	15.139
10.	Lasinrang	7	6.850	6.142	12.992
11.	Paleteang	6	13.178	12.149	25.327
12.	Batu Lappa	5	3.64	3.677	7.351
TOTAL		108	133.392	124.023	257.415

6. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Setahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999, pemerintah bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengeluarkan UU No. 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No.3 Tahun 1999 tentang pemilu. Pokok isi dari UU No. 4/2000 adalah adanya perubahan penting, yaitu

bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah komisi pemilihan umum (KPU) yang independen dan nonpartisan. Independen dan nonpartisan inilah label baru yang disandang oleh KPU saat ini. KPU baru ini terjadi atas para anggota yang dipilih oleh orang-orang yang independen dan nonpartisan.

Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, yaitu pada pemilu 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan para fungsional partai peserta pemilu, dalam perjalanan KPU saat itu, public melihat secara jelas bagaimana sangat kuatnya unsur kepentingan (interens) mengenai setiap kegiatan KPU, sehingga sangat sering di bahas dalam pembahasan keputusan-keputusan KPU yang harus menghadapi situasi deadlock. Hal ini tentu tidakalah menggembirakan, khususnya dilihat dari sudut pengembangan Citra dan pengembangan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Atas dasar pemikiran bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu seharusnya bersih dan intervensi partai politik dan pemerintah, maka DPR bersama pemerintah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 2000 yang secara tegas menyatakan bahwa anggota KPU terdiri dari orang-orang independen dan nonpartisan.

Sifat independen dan nonpartisan KPU saat ini tercermin dari proses seleksi calon anggota KPU. Dari semua calon anggota KPU yang diajukan Presiden kepada DPR untuk mendapat persetujuan, tidak satupun yang berasal dari partai politik. Pada umumnya para calon berasal dari kalangan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Adapun persyaratan untuk menjadi salah satu anggota KPU diantaranya:

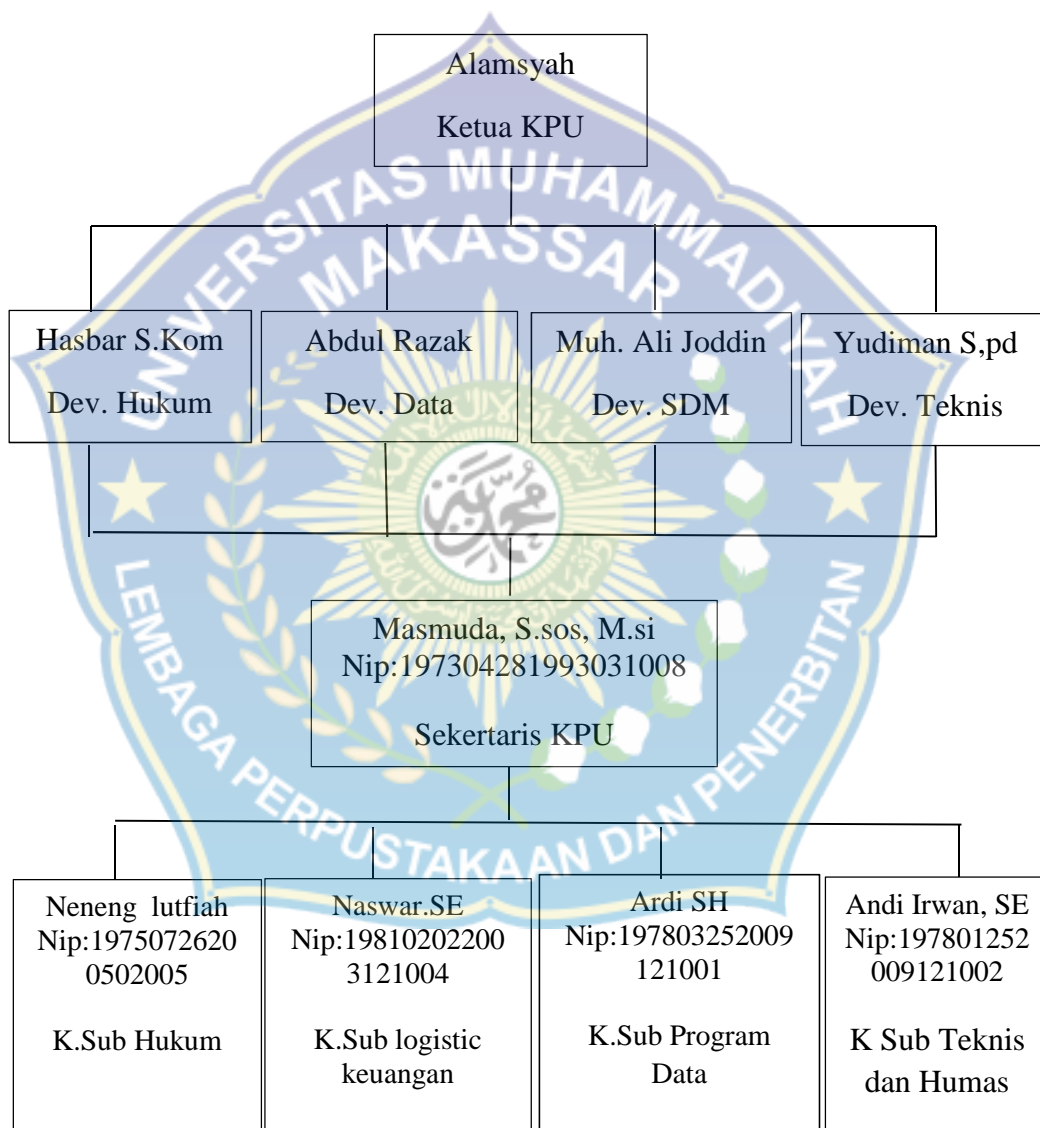
1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berhak memilih dan dipilih
3. Mempunyai komitmen yang kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan
4. Memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil
5. Pengetahuan yang memadai tentang politik, kepartaian, pemilu dan kemampuan kepemimpinan
6. Tidak terikat dalam anggota atau pengurus partai politik
7. Tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dalam jabatan pegawai negeri.

KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal ini tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan UU tentang pemilu. Seluruh anggota KPU dan perangkat pendukungnya harus lebih menyadari bahwa pemilu yang lalu harus lebih berkualitas dari pemilu yang akan datang. Oleh karena itu KPU harus mampu menyelenggarakan pemilu dengan tetap mengedepankan pencapaian asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta beradab.

Guna mendukung tercapainya sasaran KPU membentuk sejumlah peraturan yang berlaku untuk penyelenggaraan pemilu yang berkualitas misalnya peraturan tata tertib KPU dan Kode Etik Pemilu

7. Bagan Struktur Bagan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten.



1.4 Struktur Organisasi Kantor KPU Kabupaten Pinrang

8. Visi dan Misi KPU Kabupaten Pinrang:

Visi:

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, provisional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi:

- a) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum
- b) Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis.

9. Pemilih Pemula Kabupaten Pinrang

Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi di masa mendatang adalah pemilih pemula, selain jumlahnya yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang siapa pemilih pemula, bagaimana peran mereka dalam pemilu, serta tema apa yang dapat dijadikan bahan dalam upaya peningkatan peran pemilih pemula dalam pemilu.

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, pemilih pemula merupakan masyarakat yang telah memenuhi syarat-syarat seperti berikut

- a. Berusia 17 tahun
- b. Sudah pernah kawin
- c. Purnawirawan/sudah tidak terikat lagi dalam keanggotaan TNI/Kepolisian

Pengetahuan yang menyangkut tentang pemilihan umum sangat penting bagi pemilih pemula terutama mereka yang memiliki usia 17 tahun. Disinilah peran KPU sangat penting memberikan kesan awal tentang pentingnya hak suara mereka dalam pemilu bahwa hak suara mereka dapat menentukan siapa pemimpin selanjutnya serta meningkatkan kesejahteraan

bangsa dan Negara pemahaman yang baik diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus menjadi pemilih yang cerdas, pemilih pemula lainnya juga mempunyai peran yang penting sehingga diperlukan kebijakan strategis yang memudahkan mereka dalam menggunakan hak pilihnya.

Perbedaan jenis kelamin ini diharapkan tidak menjadi salah satu hambatan bagi pemilih pemula dalam rangka menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 dimana setiap warga Negara wajib menentukan pilihannya.

Pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Pinrang berjumlah sekitar 38.832 dari masyarakat yang ikut berpartisipasi atau memberikan suaranya 216.168. Hal demikian karena pemilih pemula merupakan bagian dari proses demokrasi yang berlangsung.

B. Hasil Penelitian

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang.

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2018 terdapat 723 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan 12 Kecamatan di seluruh Kabupaten Pinrang, untuk melihat strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula ada beberapa strategi yang digunakan menurut Chandler, yang mengatan terdapat tiga tahap

strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, yaitu formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, dan alokasi sumber daya, merujuk dari hasil study serta strategi-strategi di atas, penelitian skripsi ini mencoba menggambarkan strategi KPU, ketiga penerapan strategi ini dapat kita lihat dari tiga langkah pelaksanaannya antara lain sebagai berikut.

a. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Sebagai komisi pemilihan umum memiliki tugas salah satunya yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama di kalangan pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini KPU Kabupaten Pinrang membuat starteginya dengan cara membuat program Relawanrisasi hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara langsung dengan Bapak Muh.Ali Joddin selaku Komisioner Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partsipasi Masyarakat dan Sumber daya Manusia:

“Strategi dari kami yaitu kami membuat satu program yaitu program relawanrisasi dengan mengadakan beberapa kegiatan yang beranggotakan 25 orang, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mencerdaskan masyarakat pemilih” selain itu kami juga memenuhi Dasar Hukum yang mengatur (wawancara Kamis 20 juni 2019 di Ruangan Ketua KPU)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa salah satu strategi dari KPU Kabupaten Pinrang adalah adanya program relawanrisasi, karena itu KPU Kabupaten Pinrang dengan segala potensinya dan waktu yang tersedia menggelar sejumlah kegiatan

sosialisasi sebagai bentuk penyebaran informasi pemilu dan pendidikan politik kepada masyarakat di Bumi Lasinrang.

Mereka mengadakan beberapa kegiatan diantaranya : sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu ke pemilih pemula *Go To School*, Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu ke ibu-ibu Bhayangkari Polres Pinrang di Aula Aspol Pinrang, Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu yang melibatkan Relawan Demokrasi berdasarkan segmennya atau kelompoknya masing-masing, Sosialisasi dan penyebaran informasi dilakukan di tempat-tempat umum seperti pasar, acara pesta rakyat, acara pernikahan dan masjid-masjid, serta Khutbah Seragam pada Jumat terakhir di masjid-masjid dan Minggu terakhir di gereja-gereja dan masih banyak lagi lainnya.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan bapak Joni Bakri selaku anggota teknis dan Hubungan masyarakat yang mengatakan bahwa

“Jadi ada beberapa hal yang juga kita lakukan yang pertama kita melaksanakan sosialisasi dimasyarakat, yang kedua kita melibatkan berbagai unsur LSM dan beberapa band dari kabupaten di Sulse dan Sulbar kita libatkan mereka dalam melaksanakan pawai kampanye dan melakukan kegiatan untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya (wawancara Kamis 20 juni 2019 di Ruang Ketua KPU).

Dari hasil wawancara tersebut bisa dilihat bahwa pihak KPU mendapatkan banyak bantuan dari pihak luar untuk mensosialisasikan informasi mengenai hak pilih atau sekedar memberikan informasi bagaimana

melakukan penceblosan pada saat pemilihan umum tiba bantuan ini dilakukan dengan metode tatap muka.

KPU Kabupaten Pinrang juga memenuhi dasar hukum yang mengatur:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahan keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2013;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pinrang Nomor 50/Pileg/Kpts/KPU-PG.025-433371/I/2014 Pembentukan Kelompok Kerja Tim Penyusunan, dan Pembuatan Bahan Pewartaan KPU Kabupaten/Kota Pinrang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

5. Komisi Pemilihan umum Nomor 609/KPU/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 perihal penyampaian Petunjuk pelaksanaan Program Relawan;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 70/pilpres/Kpts/KPU-PG.025-433371/VI/2014 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kerja Sama Sosialisasi dan Peyebaran Informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Memperhatikan hal tersebut maka ada sebuah kekuatan KPU dalam pencapaian suatu tujuan yang sesuai dengan dasar-dasar hukum yang mengatur.

b. Pemilihan Tindakan

Pada pemilihan tindakan ini dapat dikatakan juga sebagai penentuan tindakan sosialisasi dengan beberapa segmen, sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan bapak Alamsyah selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ketika diwawancarai mengatakan bahwa

“Dalam masyarakat, KPU Kabupaten Pinrang mempunyai tiga segmen sosialisasi dengan menggunakan berbagai metode untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum diantaranya masyarakat umum, mahasiswa dan Siswa SMA” (wawancara 20 juli 2019)

Berdasarkan dengan pernyataan diatas yang dikemukakan oleh Bapak Alamsyah berkaitan dengan pemilihan tindakan ini KPU Kabupaten Pinrang dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 mereka melakukan sosialisasi kepada tiga segmen

masyarakat yang pertama kepada segmen siswa SMA yang kedua kepada Mahasiswa dan yang ketiga masyarakat umum, dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya.

Untuk lebih jelasnya adapun wawancara kepada Rahman selaku anggota Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Sosialisasi Pemilih Pemula Kab Pinrang berkaitan dengan sosialisasi kepada segmen siswa SMA

“saya memberitahukan bagaimana tata cara menggunakan hak pilih yang benar dan memberikan semacam motivasi untuk datang memilih, begini dek kemarin kami hanya sempat mendatangi beberapa sekolah saja seperti SMAN 9, SMKN 2, dan SMAN 1 Pinrang ini dikarenakan jauh dari jangkauan kami” (Wawancara 22 juli 2019)

Dalam rangka sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018, KPU Kabupaten Pinrang bekerja sama dengan Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Sosialisasi Pemilih Pemula (PP-KPMP), tujuannya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, tak terkecuali dikalangan pelajar.

Sama halnya yang dilakukan oleh salah satu relawan demokrasi dalam melakukan sosialisai kepada segmen masyarakat umum, untuk lebih jelasnya adapun wawancara kepada anggota relawan demokrasi sebagai berikut.

“Kemarin saya melakukan sosialis di acara pesta rakyat kepada masyarakat umum agar pergi memilih dan memberitahukan bagaimana tata cara yang benar dalam memilih, dan sebagaian masyarakat merespon dengan baik, saya juga pernah menyampaikan melalui media elektonik dan media cetak, sedikit kendala yang kemarin saya rasakan pada saat sosilasisi ada sebagian masyarakat yang kurang memahami seperti orang tua dikarenakan beberapa sebab” (wawancara 20 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa salah satu relawan demokrasi telah mengsosialisasikan tentang bagaimana cara memilih yang benar dengan menggunakan beberapa metode diantaranya melakukan sosialisasi di acara pesta rakyat sehingga beberapa masyarakat merespon dengan baik dan juga sosialisasi menggunakan media elektronik, media cetak, dan reklame. Adapun kendala yang dihadapi ada beberapa masyarakat yang lanjut usia kurang paham sehingga pada pemilihan umum kemarin masih ada suara yang tidak sah dan masih ada masyarakat yang tidak memilih.

Sosialisasi pemilu sangatlah penting mengenai tata cara yang benar dalam menggunakan hak pilih, seperti juga yang dikatakan oleh salah satu informan Irwan selaku anggota relawan demokrasi bagian pemilih pemuda mengatakan bahwa

“Saya pergi kebeberapa kampus-kampus yang ada di kabupaten Pinrang seperti Universitas Cokrominoto Pinrang dan UIT (Universitas Indonesia) saya hanya memberikan sedikit pemahaman kepada mereka tentang pentingnya memilih pemimpin karena saya tau mereka lebih tau tentang bagaimana menjadi pemilih yang cerdas” (wawancara 20 juli 2019)

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara informan diatas dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan partisipasi politik relawan demokrasi mendatangi beberapa Universitas dengan memberikan sedikit pemahaman kepada para mahasiswa tentang pentingnya menggunakan hak pilih Mahasiswa juga menjadi bagian penting.

Beberapa peluang yang memudahkan KPU Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan partisipasi termasuk dikalangan pemilih pemula KPU mengajak bekerjasama dengan beberapa ormas dalam sosialisai pemilu dengan tujuan menghemat waktu, biaya dan efisien tepat sasaran, tetapi hal ini juga membuat sosialisasi kurang maksimal, seperti pernyataan Bapak Joni Bakri selaku anggota teknis dan humas sebagai berikut

“Mengenai sosialisasi KPU tentang Pemilu kemarin ini kurang begitu jelas, karena yang menyampaikan sosialisasi bukan ahlinya atau bukan petugas KPU itu sendiri melainkan dari organisasi yang ada walaupun sudah dibekali pegangan materi dari KPU tetapi kurang ahlinya dalam menyampaikan jadi sebagian masyarakat tidak paham apa yang disampaikan, bukan hanya itu saja ada sebagian wilayah di Kabupaten Pinrang tidak tersentuh sosialisasi seperti daerah dataran tinggi wilayah utara Kabupaten Pinrang diantaranya Batulappa, Duampanua dan Lembang menjadi kendala tersendiri bagi setiap penyelenggara” (wawancara Bapak Joni Bakri anggota teknis dan humas 20 juli 2019)

Banyak masyarakat pemilih pemula yang tidak mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pinrang karena sosialisasi yang dilakukan wilayahnya dibatasi dan sosialisasi yang dilakukan hanya disalurkan dari organisasi-organisasi, sehingga penyampaian sosialisasi itu tidak begitu baik karena yang menyampaikan bukan ahlinya atau bukan anggota KPU, walaupun mereka telah dibekali dengan pegangan materi yang diberikan oleh anggota KPU tetapi kurang ahlinya dalam menyampaikan maka sebagian dari masyarakat kurang memahami bagi yang memiliki usia lanjut.

c. Alokasi Sumber Daya

Alokasi sumber daya ini juga berkaitan dengan kemampuan individu atau organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan, hal ini dengan ungkapan bapak Ali Joddi juga selaku bagian sumber daya mengatakan bahwa

“Sumber dana dari kegiatan-kegiatan kita ini dek berasal dari APBN (wawancara 20 juli 2019) bapak Ali Joddin

Hal demikian dilanjut oleh bapak Alamsyah memberikan jawaban mengenai pertanyaan saya tentang kemampuan individu atau organisasi dalam melakukan tugasnya

“Begini dek terkhusus pada relawan demokrasi kemarin yang dibentuk masih terdapat orang-orang yang tidak memahami keberadaanya selain itu sosialisasi yang dilakukan masih terbatas” (wawancara Alamsyah Ketua KPU Kabupaten Pinrang 20 juli 2019)

Dari pernyataan di atas bahwa tingkat pemahaman terkhusus pada relawan demokrasi yang dibentuk kemarin kurang pemahaman terhadap tujuan serta tugas dan fungsinya, jelas hal ini akan mempengaruhi kinerja. Pemahaman terhadap tugas-tugas yang diberikan relative masih kurang sehingga sering mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan.

Lalu di tambahkan pernyataan oleh Bapak Ali Joddin selaku devisi SDM terkait dengan upaya peningkatan pemahaman pegawai berikut ini:

“ya memang harus diakui pehaman relawan demokrasi kita tidak semuanya paham namu kita selalu arahkan breafing atau bimtek, setiap seminggu sekali kita selau rapat” (wawancara Ali Joddin 20 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pinrang dalam peningkatan kualitas dilakukan seperti

bimbingan teknis, breafing dan lain-lain, namun harus diperbanyak tingkat pemahaman sebagai mana tugas dan fungsi menjadi seorang relawan demokrasi, kekurangan pemahaman kinerja terhadap tujuan organisasi mengakibatkan tidak dapat terciptanya mekanisme kerja yang baik, hal ini juga mengakibatkan sosialisasi menjadi kurang maksimal.

2. Faktor Penghambat Sehingga Pemilih Pemula Tidak Ikut Serta Dalam Partisipasi Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang

Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai warga Negara yang baik memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat, dan kegiatan politik menjadi tolak ukur seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik, begitu juga dengan pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih untuk menentukan kemana mereka harus memilih.

Untuk melihat lebih jelasnya lagi, dari beberapa responden dan informan tentang faktor penghambat partisipasi politik pada pemilih pemula dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang diantaranya

a) Kesibukan kegiatan sehari-hari

Salah satu yang perlu kita ketahui bersama bahwa kelompok pemilih pemula yang memiliki usia 17-21 tahun yang bertempat tinggal di Kecamatan Daupanua Kabupaten Pinrang ini banyak dalam kalangan

pelajar dan Mahasiswa bukan hanya dari kalangan pelajar tapi dalam kalangan pekerja muda juga banyak, adapaun salah satu dari informan kita mengatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat sehingga mereka tidak ikut serta dalam berpartisipasi

“Begini kak saya sebagai pelajar jadi yang paling di utamakan menurut saya yaitu sekolah dan belajar, dan hak sebagai warga Negara untuk mengsucceskan pemilu menyotreg di TPS saja sudah cukup menurut saya”. (wawancara Haryati Yusuf (18) Pelajar SMA Negeri 2 Duampanua Sabtu 22 juni 2019)

Dari hasil wawancara diatas menunjuka sebagian pemilih pemula memiliki sikap acuh tak acuh, dimana mereka bermasa bodoh dan tidak mempunyai minat atau perhatian terhadap pemilu, untuk menghilangkan anggapan seperti ini di harapkan KPU Kabupaten Pinrang agar lebih memperkuat sosialisasi mereka, guna menghilangkan sikap apatis para pemilih terutama dikalangan pemilih pemula.

Hal ini di juga diperkuat oleh salah satu informan Bapak Joni Bakri anggota teknis dan hubungan masyarakat KPU Pinrang mengenai faktor yang menghambat sehingga masyarakat tidak ikut dalam memilih mengatakan bahwa

“saya liat kemarin dari partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat pada pemilihan umum yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya memilih pemimpin, yang kedua adalah perilaku masyarakat yang sebagian cenderung acuh (malas) dan yang ketiga mereka yang tak percaya lagi dengan janji-janji yang diberikan oleh para caleg” (wawancara, 20 Juli, 2019)

Berdasarkan pada keterangan informan di atas menjelaskan bahwa faktor penghambat sehingga mereka tidak ikut berpartisipasi atau memilih pada

pemilu kemarin di karenakan mereka cenderung acuh terhadap bagaimana pentingnya memilih pada pemilihan kemarin mereka seakan masah bodoh. Adapun hal yang lain diketahui bahwa sebagian dari mereka sudah tidak percaya lagi terhadap janji-janji yang dikatakan para caleg dikarenakan mereka menganggap hal tersebut Cuma janji dan tidak akan dilaksanakan.

b) Pengaruh dari Lingkungan Keluarga

Pihak keluarga adalah faktor yang berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang, pihak keluarga dapat mendukung bahkan menentang perilaku anggota keluarganya yang lain jika salah satu dari mereka tidak mendukung keputusan keluarganya maka orang tersebut lebih banyak mengurungkan. Pertanyaan kemudian diutarakan oleh beberapa informan salah satu dari mereka Ananda mengatakan bahwa

“Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kemarin saya menjatuhkan pilihan saya sesuai dengan pilihan dari keluarga saya, maka saya menjatuhkan pilihan saya sesuai dengan pilihan orang tua saya” (wawancara anti mahasiswa 20 tahun sabtu 22 juni 2019)

Tidak berbeda dengan yang diutarakan oleh Ramlah

“iya kemarin saya datang memilih juga kak, karena saya ingin menambah suara, kebetulan calon anggota bupati kemarin yang saya dukung merupakan keluarga.” (wawancara dengan Ramlah ibu rumah tangga 21 tahun sabtu 22 juni 2019)

Berdasarkan pernyataan diatas dikemukakan oleh beberpa informan partisipasi yang ikut-ikutan, mengapa demikian kerena mereka belum mampu melihat bagaimana calon pemimpin yang baik, sehingga mereka mudah mendapat pengaruh dari lingkungan dan tempat tinggal mereka terkhusus dalam keluarga atau orang tua mereka.

c) Perasaan Tidak Mampu

Perasaan minder ini biasanya oleh tingkat pendidikan yang rendah atau status social ekonomi yang rendah, untuk lebih jelasnya salah satu dari informan mengatakan

“Aku malu untuk ikut serta dalam jajaran anggota kepanitiaan karena untuk menjadi panitia harus mampu berbicara di depan orang banyak” (Hasnidar 20 tahun wawancara 23 juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas kurangnya partisipasi politik disebabkan karena KPU Kabupaten Pinrang juga kurang dalam memberikan bimbingan pendidikan pemilu terutama pada mereka yang tidak memiliki pendidikan jadi sebagian dari mereka merasa tidak mampu untuk ikut serta dalam kepanitiaan.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Pembahasan hasil peneliti ini dilakukan untuk memberikan penafsiran terhadap hasil yang diperoleh selama peneliti berlangsung. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Chandler di dalam teori ini memberikan bagaimana strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi politik diantaranya yaitu:

1. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Pada formulasi dan sasaran jangka panjang ini membahas tentang kejelasan perencanaan sosialisasi. Berdasarkan Temuan di lapangan yang dijelaskan oleh bapak Ali Joddin selaku Komisioner Devisi sosialisasi

pendidikan pemilih, partisipasi pemilih dan SDM mengatakan bahwa KPU Kabupaten Pinrang membuat suatu program Relawanisasi yang beranggotakan 25 orang, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mencerdaskan masyarakat pemilih. Dalam hal ini KPU Kabupaten Pinrang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai lembaga penyelenggara pemilu memandang hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan. Karena itu, KPU Kabupaten Pinrang dengan segala potensi dan waktu yang tersedia, menggelar sejumlah kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh Masyarakat umum dan masyarakat yang terlibat dalam pemilu, sebagai bentuk penyebaran informasi pemilu dan pendidikan politik kepada masyarakat di Bumi Lasinrang.

KPU Kabupaten Pinrang mempunyai kekuatan dalam menyelenggarakan pemilu yang didasari oleh beberapa dasar hukum:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahan keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang tahapan, program, dan jadwal

penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2013;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pinrang Nomor 50/Pileg/Kpts/KPU-PG.025-433371/I/2014 Pembentukan Kelompok Kerja Tim Penyusunan, dan Pembuatan Bahan Pewartaan KPU Kabupaten/Kota Pinrang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
5. Komisi Pemilihan umum Nomor 609/KPU/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 perihal penyampaian Petunjuk pelaksanaan Program Relawan;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 70/pilpres/Kpts/KPU-PG.025-433371/VI/2014 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja, Kerja Sama Sosialisasi dan Peyebaran Informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

2. Pemilihan Tindakan

Penentuan tindakan sosialisasi sesuai dengan segmen yang ditujukan seperti yang dikatakan informan oleh bapak Alamsyah selaku Ketua KPU Kabuapten Pinrang yang mengatakan mereka melakukan sosialisasi kepada tiga segmen yang pertama yaitu kepada masyarakat pemilih pemula atau siswa SMA dalam melakukan sosialisasi kepada siswa SMA ini KPU

Kabupaten Pinrang bekerjasama Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Sosialisasi Pemilu Pemula (PP-KPMP), dengan mendatangi beberapa sekolah menengah atas yakni SMAN 9, SMKN 2, dan SMAN 1 Pinrang dengan tujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada siswa-siswa tersebut, dan seperti yang dikatankan oleh informan Rahman sebagian dari sekolah SMA yang ada di Kabupaten Pinrang mereka tidak mendatanginya dikarenakan jauh dari jangkauannya. Yang kedua yaitu kepada masyarakat umum KPU Kabupaten melibatkan relawan demokrasi berdasarkan kelompok masing-masing yang telah dibagikan (Disabilitas, marginal, pemuda, agama, perempuan) dalam melakukan sosialisasi mereka menyampaikan di acara-acara terbuka seperti pesta rakyat dan melalui media elektronik dan media cetak dan adapun salah satu kendala yang dihadapi yaitu ada beberapa masyarakat yang kurang memahami dikarenakan beberapa sebab diantaranya factor usia. Dan yang terakhir kepada segmen Mahasiswa KPU Kabupaten Pinrang juga bekerja sama Relawan demokrasi dengan mendatangi forum organisasi Mahasiswa dan mendatang universitas yakni Universitas Cokrominoto dan UIT (Universitas Indonesia Timur) dengan tujuan memberikan informasi.

Bekerja sama KPU Kabupaten Pinrang dengan beberapa organisasi memudahkan KPU untuk menarik tingkat partsipasi masyarakat, tetapi salah satu informan kita bapak joni mengatakan hal seperti ini juga tidak memaksimalkan sosialisasi mengapa demikian karena mereka hanya menyampaikan sekedar pesan saja meskipun mereka telah dibekali

pendidikan politik dari KPU tetapi tetap juga tidak sama karena yang menyampaikan bukan ahlinya sehingga masyarakat tidak terlalu paham.

3. Alokasi Sumber Daya

Sumber dana yang diberikan berasal dari APBN menurutnya anggaran yang diberikan sudah cukup baik, yang menjadi kendala mereka yaitu kurangnya pengetahuan para relawan demokrasi tentang tugas dan fungsinya, kurangnya pemahaman relawan demokrasi akan mempengaruhi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan adanya masalah seperti ini KPU Kabupaten Pinrang dengan upayanya memberikan bimtek dan mengadakan briefing setiap seminggu sekali ini adalah salah satu upaya mereka tetapi alangkah baiknya lagi jika dilakukan lebih rutin agar mereka dapat memahami secara cepat.

Faktor yang berpengaruh sehingga pemilih pemula tidak ikut berpartisipasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang salah satu diantaranya:

1. Kesibukan Kegiatan Sehari-hari

Pemilih pemula umumnya mereka berstatus pelajar, mahasiswa dan pekerja, sangat wajar bagi para pemilih pemula yang rata-rata memiliki umur 17-21 tahun. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara salah satu informan yang bersatus pelajar mengatakan bahwa tugasnya hanya bersekolah dan belajar dan hak sebagai warga Negara untuk mengsucceskan pemilu menyontrenng di TPS saja sudah cukup. disinilah dapat juga kita lihat bahwa sebagian dari mereka memiliki sikap apatis. Sikap apatis dalam

kamus besar yaitu acuh tak acuh atau bermasa bodoh. Salah satu hal yang membuat para pemilih pemula enggan melakukan kegiatan politik karena menyita waktu yang banyak tentunya ini menjadi alasan bagi para pelajar dan pekerja, masalah seperti ini sebenarnya dapat diatasi dengan cara pembagian waktu antara bersekolah dan bekerja.

2. Pengaruh Dari Lingkungan Keluarga

Pihak keluarga adalah factor yang berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Pada faktor ini Kepatuhan anak terhadap orang tuanya lazim terjadi, melihat dari beberapa jawaban informan mereka ikut berpartisipasi tetapi dalam hal menentukan pilihannya mereka mengikuti sesuai pilihan dari keluarganya bahkan juga mereka memilih calon legislative dikarenakan ada hubungan kekeluargaan partisipasi tersebut dapat dikatakan sebagai partisipasi yang ikut-ikutan. Perilaku orang tua yang demikian biasa menyebabkan sang anak tidak memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin yang tepat didaerahnya. Menurut penulis, perilaku pemilih pemula ini mudah diintimidasi, khususnya dalam menetapkan pilihannya pada pemilih sebagaimana sifat mereka yang sangat rentang dan masih labil.

3. Perasaan Tidak Mampu

Perasaan minder ini biasanya disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah atau tingkat social ekonomi yang rendah, mereka merasa tidak berhak untuk tampil dalam kegiatan politik, karena mereka menyadari bahwa kenyataan yang ada dalam masyarakat politik lebih berhak bagi

mereka yang punya punya pengalaman, hal ini disebabkan karena sebagian dari pemilih pemula yang ada di Kabupaten Pinrang tidak tersentuh atau tidak mendapat pendidikan politik sejak dini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dari informasi dan tentang bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang sehingga diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 dilihat dari tiga indikator strategi yaitu yang pertama tahap formulasi dan sasaran jangka panjang tahap ini menunjukkan bahwa sudah adanya kejelasan strategi yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai, yang kedua tahap pemilihan tindakan pada tahap ini KPU Kabupaten Pinrang sudah berupaya secara maksimal melakukan sosialisasi ke beberapa segmen masyarakat dengan berbagi metode yang digunakan, ketiga alokasi sumber daya pada tahap ini terkhusus mengenai relawan demokrasi belum sepenuhnya dikatakan baik karena sebagian dari mereka tidak paham terhadap tugas dan fungsinya tetapi dalam hal ini KPU Kabupaten Pinrang berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka dengan memberikan bimbingan teknis dan briefing meskipun tidak dilakukan secara rutin.
2. Faktor yang berpengaruh sehingga pemilih pemula tidak ikut serta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang hal ini terlihat

dari hasil wawancara pembahasan di atas pertama, kesibukan sehari-hari, kedua pengaruh dari lingkungan keluarga dan ketiga perasaan tidak mampu.

B. Saran

1. KPU kabupaten Pinrang hendaknya melakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan anggotanya terutama pada relawan demokrasi sehingga mampu bertindak efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.
2. Dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih seharusnya dilakukan berkesinambungan, tidak hanya pada saat ada pemilu/pilkada tetapi setiap tahun seharusnya menjadi rutinitas yang harus dikerjakan.
3. Pemilih pemula hendaknya lebih membuka dirinya untuk dapat menunjukkan kemampuannya dalam dunia politik, serta menjauhkan diri dari perasaan tidak mampu atau minder



DAFTAR PUSTAKA

- Agung Nugroho. 2018. Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Kerinci. Universitas Lampung.
- Alfabate Gaffar, Janedji M. 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad mufid, Pentingnya Pemilu Dikalangan Pemilih Pemula, wordpress.com, diakses tanggal 25 juni 2018.
- Arifin Anwar. 2004. Strategi Komunikasi. Bandung: Armilo.
- Bambang, Hariadi. 2005. Strategi Manajemen . Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Budiardjo, Mariam. 1998. Dasar-dasar Ilmu Politik. Edisi Refisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Onong Uchjana. 2016. Ilmu Komunikasi Dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Efriza. 2012. *Political Explore* Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta.
- Firman. 2014. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Gleko, Petrus, dkk. 2017. Stategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Poltik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. Ilmu Social Ilmu Politik. Vol. 6 No. 1. Unitri.
- Huntington Samuel P. Dan Joan Nelson. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Jeky Tinuntung. 2014. FISIPOL. Ilmu Pemerintahan. Universitas Sam Ratulangi, Bandung.
- Kaelola, Akbar. 2009. Kamus Istilah Politik Kontemporer. Yogyakarta: Cakrawala.
- Maran, Rafael Raga. (2007). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Asdi Mahasatya.

- Melani, Indar. 2013. Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Duampanua Pada Pemilukada Kabupaten Pinrang. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Moleong, Lexy J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Azzira. Tinjauan Mengenai Pemilih Pemula. Muhammadazzikra15.blogspot.com, 7 April 2015. Diakses Tanggal 31 Mei 2018.
- Muslimin, Agus. 2013. Faktor-Faktor Partisipasi Politik Pemilih Pemula Kecamatan Andir. Jawa Barat: Kantor KPUD Kota Bandung.
- Rangkuti, Freddy. 2009. Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integralitas Marketing Communicatijon. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rudi Cahya Putra. Partisipasi Politik. Informasiana.com. 15 Januari 2016. Diakses tanggal 30 mei 2018.
- J. Salusu. 2015. Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit: Jakarta. Grasindo.
- Sugiyono. 2017. Metode Penlitan Kualitatif. Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.
- Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Supriyono, Arifin. 2014. Mendongkrak Partisipasi Pemilu di Indonesia. Perludem.
- Tripomo, Tedjo dan Undan. 2005. Manejemen Strategi. Bandung: Rekayasa Sains Bandung.
- Usman. Ali, 2015. Partisipasi Pemilih Pemula dalam Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014. Skripsi UMY.

<http://kpupinrang-kab.id/visi-misi/>

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

UU No.3 Tahun 1999 tentang pemilu

UU No. 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No.3 Tahun 1999 tentang pemilu.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Ratifikasi Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. Pemilih Pemula.



Lampiran:



Wawancara kepada Ketua KPU Kabupaten Pinrang dan Komisioner divisi sosialisasi partisipasi masyarakat.



Wawancara Kepada Komisioner divisi patisipasi masyarakat



Sosialisasi kepada pemilih pemulah di SMK Negeri 2 Pinrang



Sosialisasi kepada masyarakat umum di Kecamatan Paleteang



Bimbingan Teknis Para Relawan Demokrasi.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.unot



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1848/05/C.4-VIII/V/1440/2019

11 Syawal 1440 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

14 June 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Pinrang

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Liumas

di -

Pinrang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1416/TSP/A.6-VIII/VI/1440 H/2019 M tanggal 13 Juni 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : DEWI SRI LESTARI

No. Stambuk : 10561 0539015

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilih Pemula Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Juni 2019 s/d 15 Agustus 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 18 Juni 2019

Nomor : 070/ 218 /Kemasy.

Kepada

Lampiran : -

Yth, Sekretaris KPU Kab. Pinrang

Perihal : Rekomendasi Penelitian

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor.1848/05/C.4-VIII/V/1440/2019 tanggal 14 Juni 2019 Perihal Permohonan Izin Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : DEWI SRILESTARI
NIM : 10561 0539015
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Pekkabata
Telepon : 082346968595.

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIH PEMULA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2013 DI KABUPATEN PINRANG**" Yang Pelaksanaannya pada tanggal 15 Juni s/d 15 Agustus 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Ub.

Asisten Administrasi Kemasyarakatan



Labir SJE
Pangkal Pembina Tk. I

Nip : 19701011 199202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas P dan K Kab. Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab. Pinrang di Pinrang;
6. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
7. Camat Watang Sawitto di Pinrang;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan. Bintang No. Pinrang Tlp. (0421) 923859, Fax (0421) 924804
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 261 /SDM.03.2-Kt/7315/Sek-Kab/VIII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MASMUDA, S.Sos., M.Si**
NIP : 19730428 199303 1 008
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang
Alamat : Jl. Bintang Kelurahan Maccorawalie Pinrang

Dengan ini menerangkan :

Nama : **DEWI SRI LESTARI**
NIM : 105610539015
Alamat : Pekkabata
Program Study : Ilmu Administrasi Negara
Lembaga Pendidikan : Universitas Muhammadiyah Makassar

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 15 Agustus 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul "**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIH PEMULA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2018 DI KABUPATEN PINRANG**".

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Agustus 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG



MASMUDA, S.Sos., M.Si

NIP. 19730428 199303 1 008

RIWAYAT HIDUP



DEWI SRI LESTARI. Lahir di Pinrang pada tanggal 27 September 1997, buah kasih dari pasangan Ayahanda Mustari dengan Ibunda Jumria. Anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis menempuh Pendidikan di TK Pertiwi dan selesai pada tahun 2002 kemudian melanjutkan pendidikan SD Negeri 175 Duampanua Kabupaten Pinrang pada tahun 2003 dan tamat tahun 2009. Kemudian masuk di SMP Negeri 1 Duampanua Pinrang dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Pinrang Sinjai Selatan dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Unismuh Makassar Jurusan PGSD.

Berkat rahmat Ilahi Rabbi dan kerja keras serta Doa yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan studi dengan karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Penerapan Strategi (AMBT) Aktivitas Membaca Berpikir Terbimbing terhadap Hasil Belajar Kemampuan Membaca Pemahaman Interpretatif Murid Kelas IV di SDN 54 Batuleppa Kabupaten Sinjai”.